

Judul : Susah Merayu Perempuan Berpolitik
Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Susah Merayu Perempuan Berpolitik



INSTAGRAM @GUSPARDI.GAUS

Guspardi Gus
Anggota Komisi II DPR

APA alasan DPR tidak mau merevisi PKPU, khususnya pada poin keterwakilan perempuan dalam politik minimal 30%?

Jadi begini, alasannya pertama kita baru mengesahkan PKPU ya kemudian dilakukan konsinyasi (konsinyering) dan diparipurnakan di Komisi II. Pembicaraan dalam konsinyasi itu lebih spesifik dan kalau ada diskusi juga dinamika itulah ranahnya hasil yang dike-

luarkan. Jadi, PKPU itu tidak ujug-ujug ada, jadi lewat konsinyasi, diskusi, dan penyaringan.

Namun, kemudian aturan itu menimbulkan pertentangan, bagaimana tanggapan Anda?

Kan sudah dilakukan uji publik yang dilakukan KPU, dan hasil itu responsnya ya itu apa yang kita sepakati bersama DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Persentase itu masalah matematis tetap dengan hitungan ke bawah jika di bawah lima. Hitungan persentase itu sudah diatur secara dunia dan ada aturannya jangan sampai kita *diketawakan* dunia.

Lalu, apa lagi alasan DPR tidak mau merevisi PKPU Nomor 10/2023?

Tahapan pemilu sudah jalan 1 hingga 14 Mei kita melakukan pendaftaran. Kalau dalam pendaftaran itu bolong, tidak bisa. Pendaftaran berdasarkan kuota. Jadi, itu sudah ada tahapan kalau ada perubahan baru belakangan tidak mungkin *grasu-grusu*. Kita membuat aturan main dari awal perencanaan sudah dilakukan secara matang dan bertahap, perhitungan juga berdasarkan pengalaman yang lama.

Apakah DPR tahu berapa jumlah keterwakilan perempuan untuk 2024 ini?

Iya, kami sudah dapat datanya. Ketika itu ketua tanya ke ketua KPU dari data yang masuk sampai 14 Mei artinya setelah ditutup pendaftaran caleg, datanya sudah ada di KPU mengenai keterwakilan perempuan. Ternyata dari laporan KPU malah rata-rata 37%. Dalam UU tidak dikatakan per dapil, tetapi minimal 30%.

Namun, sebetulnya partai politik ada masalah tidak untuk bisa menggaet dukungan perempuan?

Wah, itu sebetulnya juga jadi masalah partai. Susah untuk merayu perempuan ikut dalam berpolitik atau menjadi caleg. Jadi, memang parpol menghadapi persoalan merayu perempuan itu untuk terlibat dalam politik karena dia punya tanggung jawab double. Artinya, memang dua dilema bagaimana demokrasi betul-betul jadi pilihan dipilih masyarakat orang yang mau mewakili mereka di legislatif ternyata kita sodorkan malah dikatakan tidak mau. Kemarin, dari perwakilan perempuan yang mengkritik tentang PKPU juga ditantang untuk mau tidak jadi caleg. (Sru/P-3)